

KAJIAN TENTANG IMPOR DAGING SAPI DI INDONESIA

Jiuhardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Abstract

The aim of this study was to assess and determine the cause dependence Indonesia terhadap beef imported from abroad, especially Australia and the state mafia beef imports that occur from year to year as if Indonesia can not be separated from its dependency on imports. Currently, Indonesia has not been able to meet the needs of domestic beef. So it still would dependency of imported meat products. Dependence is caused by demand (demand) continues to increase, is inversely proportional to the availability (supply) of beef nationally. To meet the needs of society needed policies that support the implementation of food self-sufficiency needs, then comes the beef import policy from abroad, especially the cooperation with neighboring countries (Australia). One of the factors that cause Indonesia's dependence on imported beef is in demand (demand) of beef from the supply (supply). The increased demand caused by Indonesia's population continues to increase with the average of 2,404 hundred million, or in other words grew by 1.38 percent. In addition, the majority of Indonesia's population, or as many as 207 176 162 inhabitants (87.18 per cent) of whom are adherents of Islam and the largest in the World. Which is where most eating beef, especially at the time of religious celebrations, such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Mafia beef imports is caused by: (1) Mental businessmen, bureaucrats and people who do not boast, (2) trade system persapian less efficient and effective as well as supervision of the less maksimal and (3) The management system of import that have not been integrated between the with other parties. As for the hope of the future, among others: (1) Improving the mental businessmen, bureaucrats and society. (2) To encourage businesses to become cattle ranchers large scale in the form of PT, CV, SMEs, Firm and Cooperatives (3) Tightening oversight against the rules that apply for example, farmers may not sell cows that are still productive (regeneration) (4) Promotion of cattle farms in Indonesia in accordance with a tropical climate and land area in the hope of Indonesia may be the exporter of beef to other countries, (5) Mapping of cattle and the need for beef, (6) Implement integrated farming practices in order to achieve national self-sufficiency in meat.

Keyword: Availability Beef, Mafia Import and Self-sufficiency National Meat

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia semakin kompleks. Mulai dari masalah seperti: kependudukan, sosial, ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Diantara isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara di dunia tersebut, isu ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sebab, Masalah ekonomi tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa akan tetapi menyangkut transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya.

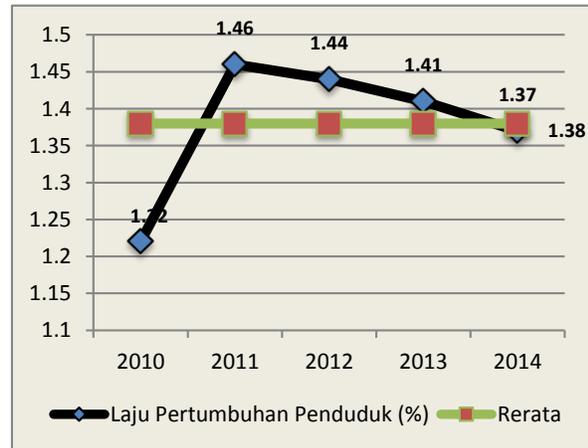
Sampai saat ini, masalah kependudukan Indonesia masih menjadi fokus perhatian pemerintah. Wilayah Indonesia yang luas dan terpisah dalam bentuk kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dari aspek koordinasi kebijakan. Ditambah dengan jumlah penduduk

yang setiap tahun mengalami peningkatan, kondisi Indonesia semakin menghadapi permasalahan yang kompleks. Tetapi, jika ditarik sebuah benang merah, sebenarnya pangkal segala permasalahan Indonesia berasal dari kependudukan. Data menurut BPS Nasional (2015), menyajikan bahwa selama 5 tahun (2010-2014), jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan dengan rerata 2,404 (ratus juta) atau dengan kata lain tumbuh sebesar 1,38 persen (Lihat Diagram 1 dan Grafik 1) dibawah ini.

Diagram 1.
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010-2014 (Ratusan Juta)



Grafik 1.
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2010-2014 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2015 (Diolah)

Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi masyarakat yang saling menghargai adanya perbedaan. Berbagai kegiatan sosial budaya dalam suatu masyarakat seperti kegiatan gotong royong dilakukan bersama-sama oleh semua anggota masyarakat tanpa melihat golongan, suku bangsa dan agama. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia, yang mencerminkan bahwa Negara ini keharmonisan dalam nilai-nilai sosial dan budaya (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010).

Diagram 2.
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama yang Dianut Tahun 2010 (jiwa)

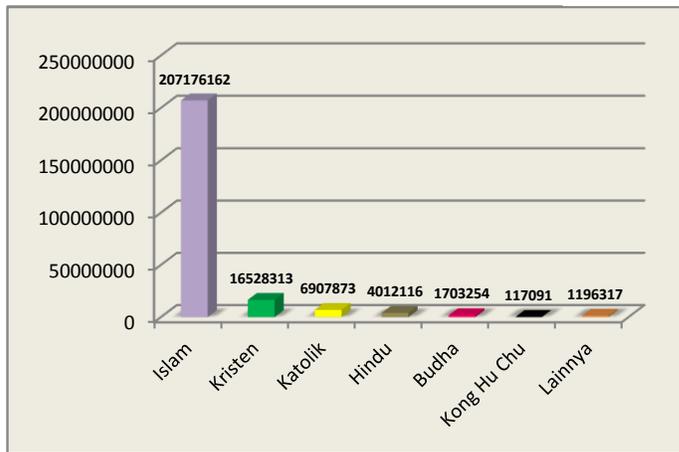
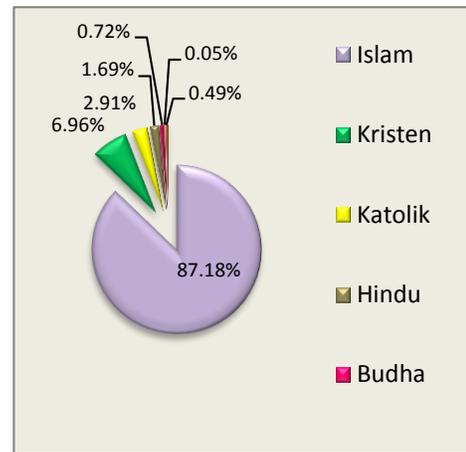


Diagram 3.
Persentase Penduduk Indonesia Menurut Agama yang Dianut Tahun 2010



Sumber: BPS Nasional, 2011 (Diolah)

Adapun data yang disajikan oleh Penulis, mengenai jumlah dan persentase penduduk Indonesia menurut agama yang dianut pada tahun 2010 lalu, terlihat bahwa dari total keseluruhan penduduk sebesar 2,314 ratus juta jiwa masih didominasi yang menganut agama islam yakni 207.176.162 jiwa (87,18 persen). Diposisi kedua, penduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 16.528.513 jiwa (6,96 persen) dan Kong Hu Chu yang paling sedikit dianut oleh penduduk yakni 117.091 jiwa (0,05 persen), dikarenakan agama ini masih baru di Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 1.196.317 jiwa penduduk (0,51 persen), menganut agama atau aliran kepercayaan lainnya (lihat Diagram 2 dan 3 diatas).

Kemudian, masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketergantungan terhadap impor pangan saat ini semakin memprihatinkan. Impor pangan masih terus terjadi dan volumenya semakin meningkat. Alasan utama kebijakan impor masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. Kondisi tersebut, pada dasarnya sudah diketahui dan dipahami oleh pemerintah sejak satu dekade yang lalu. Dokumen Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010 yang disusun oleh Kementerian Pertanian, telah menunjukkan hal itu. Arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan utama, yaitu mempertahankan swasembada padi berkelanjutan, serta mencapai swasembada untuk komoditas jagung (tahun 2007), kedelai (tahun 2015), gula (tahun 2009) dan daging sapi (tahun 2010). Namun apa dikata, alih-alih swasembada, mengurangi impor saja adalah hal sulit, mengingat tidak adanya peningkatan produksi (Sutaryono, 2013).

Ketersediaan daging sapi, baik impor maupun lokal, sangat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan daging sapi sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai dan sebagainya yang merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi. Pada kondisi krisis dan kritis kebutuhan lain masih dapat ditunda, tetapi kebutuhan ini tidak bisa ditawar-tawar. Terpenuhinya kebutuhan daging dan

susu sebagai bahan pangan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi terkait dengan harkat dan martabat kemanusiaan kita dalam perspektif sosial. Lebih dari itu kebutuhan daging dan susu untuk memenuhi konsumsi protein hewani sangat

terkait dengan kesehatan dan kecerdasan bangsa. Sulit rasanya membayangkan suatu bangsa akan maju dan berdiri tangguh jika tidak memiliki pijakan yang kuat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan (Pambagyo, 2011).

Peran pangan termasuk pangan asal ternak begitu besar sebagai bahan makanan, sumber mata pencaharian, berperan dalam perekonomian, perdagangan, bahan baku industri, sosial, budaya, termasuk politik. Karena vitalnya peran pangan dalam suatu negara sehingga pangan dikategorikan sebagai komoditi politik strategis (Daryanto, 2009).

Diagram 4.
Nilai Impor Daging Sapi di Indonesia
Tahun 2010-2014 (Juta \$)

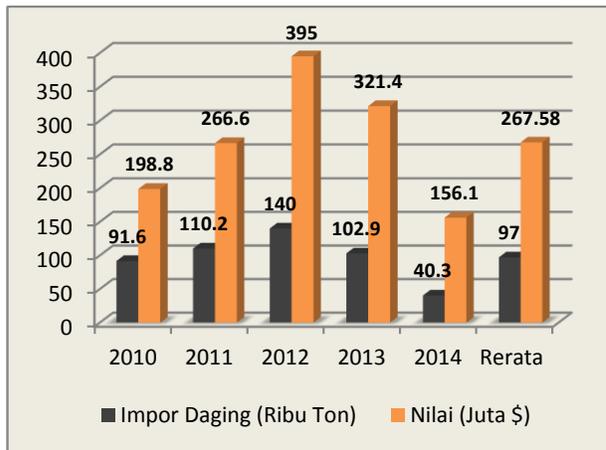
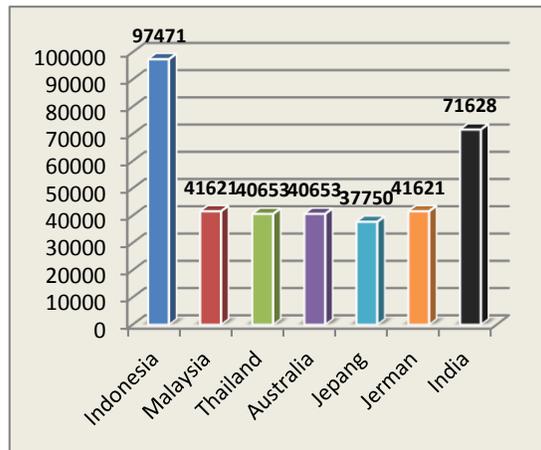


Diagram 5.
Daftar Harga Daging Sapi/Kg Bulan
Desember 2012 di Beberapa Negara



Sumber: Blogder.blogdetik.com, 2015 (Diolah) Sumber: Worl Bank, 2013 (Diolah)

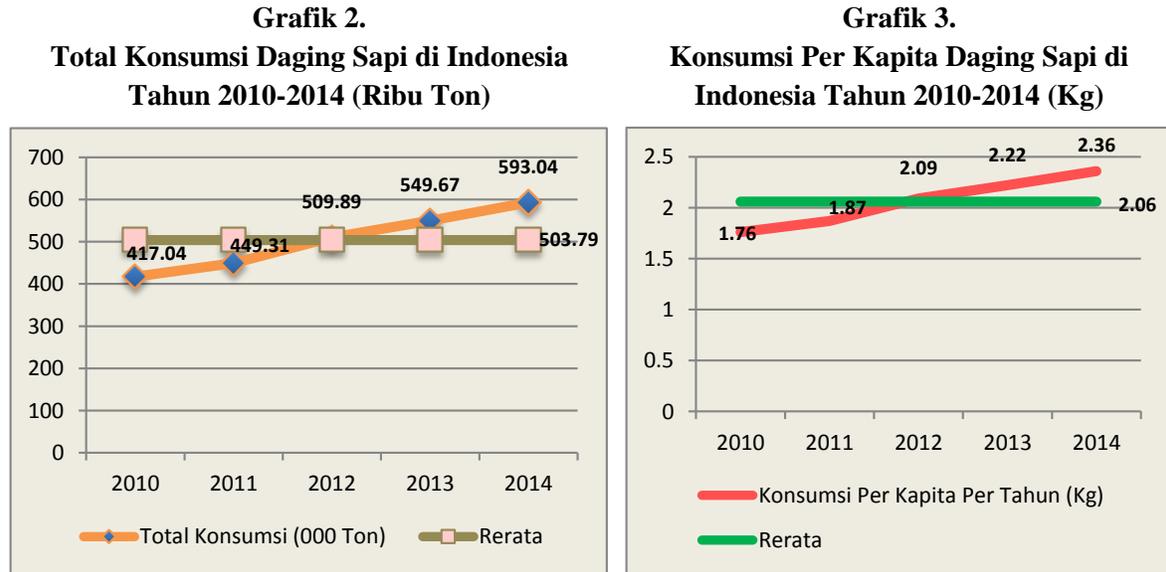
Berdasarkan pada sajian Diagram 4 diatas, yang menguraikan nilai impor daging sapi di Indonesia selama 5 tahun (2009-2014) cukup bervariasi sesuai kebutuhan permintaan (demand) pasar kebutuhan masyarakat dengan rerata 267,58 ribu ton atau bernilai 97 juta dollar amerika. Angka tersebut jelaslah tinggi, melihat ketergantungan Indonesia akan impor daging sapi yang mengakibatkan naiknya (multiplier effect) harga daging sapi dipasaran. Sejalan dengan hal tersebut, daftar harga daging sapi bulan Desember 2012, menurut data Bank Dunia di beberapa Negara, Indonesia menjadi Negara dengan harga daging sapi termahal yakni Rp 97.471/kg. Negara India berada diposisi kedua dengan harga Rp 71.628/kg, lalu termurah adalah Jepang yakni Rp 37.750/kg, dikarenakan Negara ini mayoritas penduduknya mengkonsumsi ikan segar (lihat Diagram 5).

Padaahal, daging merupakan salah satu komoditi peternakan yang menjadi andalan sumber protein hewani dan sangat menunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pangan di Indonesia. Daging terbagi ke dalam dua jenis, yaitu daging ternak besar seperti sapi dan kerbau, maupun daging ternak kecil seperti domba, kambing, dan babi. Meski dengan adanya berbagai ragam jenis daging, produk utama penjualan komoditi peternakan adalah daging sapi potong (Astawan, 2004).

Daging sapi potong juga telah menjadi salah satu bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya konsumsi daging nasional yang harus dipenuhi. Kebijakan impor dilakukan dalam rangka mendukung kekurangan produksi dalam negeri. Sampai saat ini Indonesia masih kekurangan pasokan daging sapi hingga 35 persen atau 135,1 ribu ton dari kebutuhan 385 ribu ton. Defisit populasi sapi diperkirakan 10,7% dari

populasi ideal atau sekitar 1,18 juta ekor. Kekurangan pasokan ini disebabkan sistem pembibitan sapi potong nasional masih parsial sehingga tidak menjamin kesinambungan. Padahal, titik kritis dalam pengembangan sapi potong adalah pembibitan. (Prima, 2008).

Berikut adalah pemaparan data tentang total konsumsi (ribu ton) dan konsumsi per kapita daging sapi (kg) di Indonesia tahun 2010-2014 :



Sumber: Harapan IPB 2005 & Huluman Dkk 2001, (Diolah)

Data diatas menunjukkan bahwa total konsumsi daging sapi selama 5 tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rerata 503,79 (ribu ton). Sementara, searah positif pada konsumsi penduduk Indonesia, nilai rerata 2,06 kapita/kg (lihat Grafik 2 dan 3). Belum lagi, bila dicermati fakta dilapangan bahwa dari mayoritas jumlah penduduk di Indonesia, yang paling banyak mengkonsumsi daging sapi adalah penganut agama islam dibanding yang lain, terlebih lagi pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya daging sapi meningkat juga. Permintaan daging sapi yang meningkat tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri sehingga ketersediaan daging sapi secara nasional masih kurang, maka daging sapi nasional. Penelitian ini mengamati sub-sistem kebutuhan daging sapi dan penyediaan atau produksi daging sapi nasional berdasarkan faktor-faktor yang khas dan berinteraksi secara dinamis menurut waktu dan kondisi (Dwiyanto, 2008).

Disamping itu, kasus dugaan suap yang dilakukan PT Indoguna Utama sedang jadi sorotan karena melibatkan beberapa oknum di Kementerian Pertanian dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nilai suap untuk mendapat jatah kuota impor daging sapi itu konon mencapai Rp 40 miliar. Wajar, menurut hitungan laba importir super tinggi karena bisa menjual daging di Indonesia dua kali lipat dari harga sebenarnya (surabayapost.co.id, 2013).

Oleh karenanya, melihat beberapa uraian fakta dan permasalahan diatas, Penulis

mengambil sebuah penelitian dalam paper ini yang berjudul : “Kajian Tentang Mafia Impor Daging Sapi Di Indonesia”.

DASAR TEORI

Daging Sapi Impor

Daging sapi impor merupakan daging sapi yang didatangkan dari luar negeri untuk diperdagangkan di dalam negeri. Untuk dapat disebut daging sapi impor, sapi tersebut dikembangkan dan dipotong bukan di negara pengimpornya. Daging sapi impor yang selama ini diimpor, sebagian besar merupakan daging sapi dari negara Australia, Amerika Serikat, dan Jepang. Dari tiga negara tersebut, setiap daging sapi yang diimpor mempunyai ciri khas tersendiri dan telah dipotong berdasarkan fungsinya saat dimasak (Yuyun, 2011).

Daging Sapi Lokal

Menurut Santosa, Warsito dan Andoko (2012), sapi lokal merupakan spesies asli Indonesia dan bukan merupakan sapi impor. Sapi lokal ini termasuk ke dalam rumpun bangsa Zebu dengan ciri-ciri punuk diatas pangkal leher, telinga lebar, kulit kendur, dan berembun pada moncongnya. Sapi yang berasal dan tersebar merata di Benua Asia ini memiliki daya tahan yang sangat baik dalam melawan panas dan iklim tropis. Sebaliknya, sapi bangsa Zebu agak peka terhadap hawa dingin. Ada tiga jenis sapi potong lokal, yaitu sapi Jawa, sapi Bali, dan sapi Madura.

Kualitas Daging Sapi

Menurut Trantono (2008), kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pada waktu hewan sebelum dan sesudah dipotong. Kualitas fisik daging sapi adalah warna daging, rasa dan aroma, perlemakan, dan tektur daging. Pada waktu sebelum dipotong, faktor penentu kualitas dagingnya adalah tipe ternak, jenis kelamin, umur, dan cara pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan dan perawatan kesehatan. Sedangkan kualitas daging sesudah dipotong dipengaruhi oleh metode pemasakan, pH daging, hormon, dan metode penyimpanan.

Teori Permintaan (*Demand*)

Permintaan (*demand*) adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu (Sukirno, 2006). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan:

1. Harga barang itu sendiri
Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah.
2. Harga barang lain yang terkait
Berpengaruh apabila terdapat 2 barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap).
3. Tingkat pendapatan perkapita
Dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat.
4. Selera atau kebiasaan

Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat.

5. Jumlah penduduk

Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut.

6. Perkiraan harga di masa mendatang

Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan.

7. Distribusi pendapatan

Tingkat pendapatan perkapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.

8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.

Bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya.

Teori Penawaran (*Supply*)

Penawaran (*supply*) adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada bebrbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu (Mankiw, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:

1. Harga barang itu sendiri

Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran.

2. Harga barang lain yang terkait

Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang complement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang berkurang, atau sebaliknya.

3. Harga faktor produksi

Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industry lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang.

4. Biaya produksi

Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan menbgurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang berkurang.

5. Teknologi produksi

Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang.

6. Jumlah pedagang/penjual

Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah.

7. Tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba buka hasil produksinya. Akibatnya tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara malksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum.

8. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan supply dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningktakan penawaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penulisan ini, maka penulis melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam, yakni dengan menggunakan penulisan deskriptif dan data yang digunakan merupakan data kualitatif. Namun sebelumnya penulis melakukan pencarian ide yang pada umumnya disebut *brainstorming* (Indriantoro dan Soetomo, 2002).

Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Selanjutnya menurut Moleong (2000), data sekunder merupakan data yang berasal dari selain obyek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

1. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya di Indonesia tahun 2010-2014.
2. Jumlah dan persentase penduduk Indonesia menurut Agama yang dianut Tahun 2010-2014.
3. Nilai impor daging sapi di Indonesia Tahun 2010-2014 (juta \$).
4. Daftar harga daging sapi/kg Bulan Desember 2012 dibeberapa Negara.
5. Total konsumsi daging sapi (ribu ton) dan konsumsi per kapita (kg) di Indonesia Tahun 2010-2014.
6. Penyediaan daging sapi dalam produk lokal dan impor di Indonesia Tahun 2010-2014 (ribu ton).
7. Jumlah populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau di Indonesia tahun 2010-2014 (ekor).

Data sekunder tersebut didapatkan dari beberapa sumber yakni :

1. Kementerian Pertanian atau Ditjen PKH (Pernakan dan Kesehatan Hewan).
2. BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional.
3. Dokumen Perjanjian Kerjasama dan Undang-Undang.
4. Literatur kepustakaan (jurnal) dan media massa (artikel).
5. Serta data-data lain yang mendukung penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Studi pustaka,

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Beberapa literatur tersebut dapat berupa pustaka cetak maupun elektronik. Dalam hal ini, peneliti lebih banyak mencari data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Diskusi,

Merupakan perolehan data yang dilakukan dengan cara membicarakan masalah tertentu yang ingin diketahui oleh seseorang atau kelompok orang kemudian membahas masalah tersebut. Dengan metode ini penulis melakukan komunikasi dua arah dengan informan, sehingga penulis juga bisa berpendapat tentang masalah yang dimaksud.

3. Dokumenter,

Dengan metode ini, peneliti mencari data yang relevan dari sumber-sumber atau dokumen yang berkaitan dengan cara membaca beberapa artikel dari internet. Dari sinilah berbagai data dapat dikumpulkan untuk mendukung penelitian karya tulis ilmiah ini (Sugiyono, 2004).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *thematic content analysis* (analisa isi tema). Menurut Callire (2002) dalam Marliyana (2002) dalam Prasetya (2004), analisa isi tema ini digunakan untuk mengidentifikasi dua perbandingan.

Karena metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah Kajian literature, maka analisa isi tema yang dilakukan tidak melalui interview. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah review literatur yang diringkas dan *feedback* terhadap hasil-ringkasan yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Masih Bergantung pada Import Daging Sapi ?

Masalah persapian Indonesia sebenarnya tetap terkungkung pada permasalahan klasik yang sebenarnya selalu menjadi 'pekerjaan rumah' seluruh *stake holder* persapian Indonesia dan hal ini harus diselesaikan untuk dapat memandirikan persapian nasional. Adapun beberapa permasalahan klasik tersebut antara lain :

1. Tata niaga

Distribusi dan penjualan ternak sapi potong merupakan hal penting terkait dengan penyediaan dan distribusi ternak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara jelas disebutkan dalam Pasal 36 Ayat 1 dan 2 menyatakan tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi pemasaran produk peternakan. Perlu strategi jitu dalam menjalankan sistem penyediaan ternak dan model distribusi yang kontinyu, dikarenakan ketidakseimbangan dan menguntungkan seluruh komponen tataniaga yang terlibat. Pasar hewan, RPH, jalur distribusi, penanganan karkas, penanganan *breeding* ternak sebagai penyedia bakalan ternak sapi potong dan pendataan mutasi ternak seringkali tidak berjalan dengan baik.

2. Ego sektoral

Hal ini yang membuat sebuah kolaborasi yang manis melalui penyatuan misi dan visi dalam merealisasikan kemandirian persapian nasional antar institusi terkait,

misalnya : impor ternak dan produk ikutan yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian RI dengan Kementerian Perdagangan RI. Terkadang, faktor ego sektoral merupakan kunci dasar dari kesalahan dalam komunikasi antar lembaga, sehingga baik dari segi konsep maupun program dilapangan berbenturan (*miss communication*).

3. Penegakan aturan

Penegakan aturan adalah jiwa pelaksanaan seluruh aktifitas yang menentukan perkembangan persapian nasional. Pemotongan ternak betina produktif, sapi glonggongan, daging-jerohan illegal merupakan bentuk pelanggaran yang dapat diredam melalui penegakan aturan hukum yang baik. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang “Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik” (*Good Breeding Practice*) merupakan perangkat hukum yang dapat dijadikan acuan pengembangan persapian nasional, malah terlihat kurang efektif dan efisien.

4. Program Pemerintah yang kurang terencana

Sarjana Membangun Desa (SMD), Lembaga Mandiri Mengakar pada Masyarakat (LM3) merupakan program pemerintah yang sebenarnya perlu dilaksanakan secara maksimal dan diharapkan dapat menjadikan perkembangan persapian nasional yang mantap. Namun, hal ini dirasa baik dalam konsep perencanaannya tetapi tidak berjalan stimulus dilapangan. Sehingga, harapan bagi *stake holders* tentang pengembangan persapian berbasis produktivitas SDM sia-sia.

5. Penyediaan pakan ternak

Pakan adalah komponen yang penting dalam pengembangan usaha ternak sapi potong, menciptakan integrasi yang kuat antara pertanian, perkebunan dan peternakan akan membuat sebuah pola pertanian terpadu yang tangguh dan saling mengisi. Akan tetapi, seiring dengan permintaan pakan dalam negeri yang meningkat, namun masih bergantung pada produk ekspor yang mengakibatkan naiknya (inflasi) harga barang itu sendiri.

6. Pendampingan dan bimbingan

Pelaku usaha ternak (terutama ditingkat pedesaan) memerlukan pendampingan dan bimbingan dalam melaksanakan usaha pemeliharaan ternak sehingga mampu memberikan kualitas pakan, pembibitan dan manajemen usaha yang baik dalam mewujudkan kemandirian persapian Indonesia. Ketika, pendampingan dan bimbingan dalam praktek tidak dilakukan secara berkesinambungan, maka calon pengusaha ternak yang sebenarnya ingin mandiri terhenti ditengah jalan. Apalagi, faktor SDM (trainer) itu sendiri juga kurang menyajikan solusi dilapangan, melainkan penjabaran teori yang terkesan kurang aplikatif.

Sejalan dengan hal diatas, beberapa data menunjukkan bahwa ternyata Indonesia tidak mampu memenuhi stok daging sapi potong dalam negeri, sehingga masih bergantungnya akan produk impor. Permintaan (*demand*) masyarakat yang terus meningkat, searah dengan kebijakan impor daging sapi dari luar negeri, khususnya kerja sama dengan Negara tetangga (Australia). Berikut tambahan fakta yang memperjelas alasan mengapa Indonesia masih belum mampu swasembada daging sapi :

Grafik 4.
Penyediaan Daging Sapi di Indonesia dalam Produk

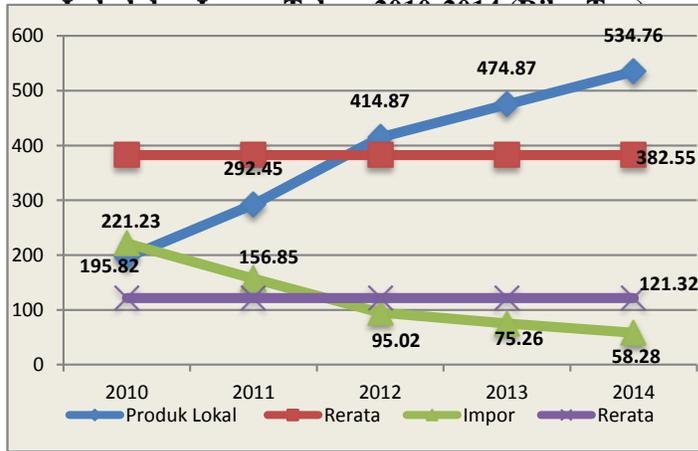
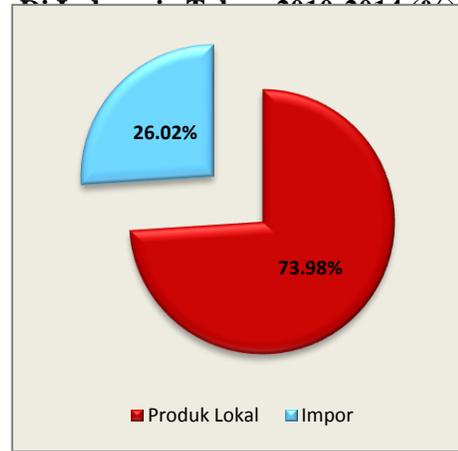


Diagram 6.
Rerata Share Penyediaan Daging Sapi



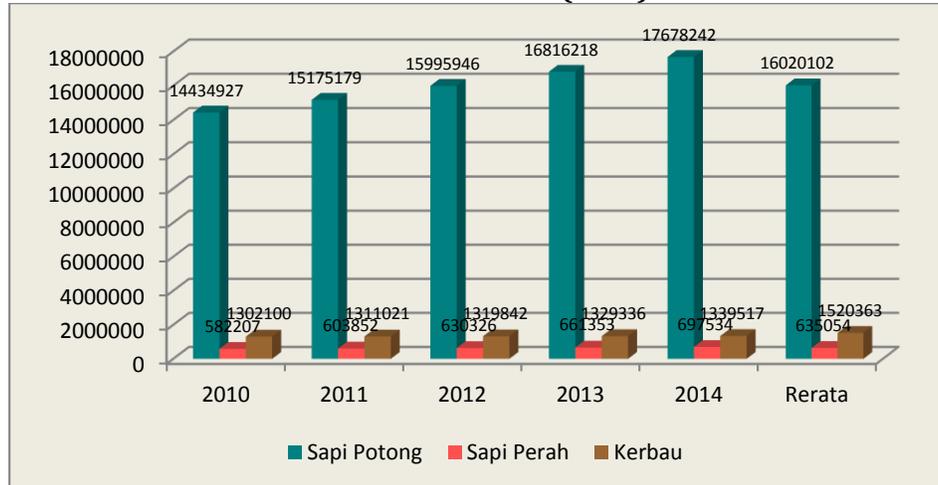
Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015 (Diolah)

Menelaah berdasarkan data Grafik 4 dan Diagram 6 diatas, jumlah ketersediaan daging sapi di Indonesia dari produk lokal sebenarnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2009-2013) dengan rerata 382,55 ribu ton. Angka tersebut berbanding terbalik dengan pasokan daging sapi dari produk impor yang terus menurun hingga mencapai rerata 121,32 ribu ton. Dengan kata lain, *share* penyediaan keseluruhan selama kurun waktu 5 tahun ini berkisar rerata 73,98 persen (produk lokal) dan sisanya 26,02 persen (produk impor).

Impor sapi Australia ke Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif dari masa ke masa. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan daging sapi nasional sampai saat ini belum dapat terpenuhi sehingga masih harus ditutupi dengan keberadaan sapi impor baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging sapi beku. Sebab saat ini jika hanya mengandalkan daging sapi dari peternak lokal maka yang dihadapi adalah semakin tinggi dan langkanya daging sapi karena ketersediaan masih kurang dibandingkan tingginya permintaan daging sapi.

Sebenarnya, jumlah populasi sapi potong, sapi perah maupun kerbau di Indonesia selama 5 tahun (2010-2014) ini cukup menjanjikan bagi stok daging ditingkat Nasional.. Data menyajikan, bahwa peningkatan jumlah populasi sapi potong (rerata 16.020.102 ekor), sapi perah (rerata 635.053) dan kerbau (rerata 1.520.363 ekor) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut dirasa belum cukup, seiring dengan lonjakan permintaan akan konsumsi komoditas ini (lihat Diagram 7).

Diagram 7.
Jumlah Populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau di Indonesia
Tahun 2010-2014 (Ekor)



Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015 (Diolah)

Kebijakan swasembada daging sapi diharapkan berkurangnya ketergantungan impor sampai 10 persen, sehingga mampu meningkatkan potensi sapi dalam negeri. Menurut Ditjennak (2010), berbagai program dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi lokal sehingga menjadi sumber daging sapi yang utama antara lain : pengurangan pemotongan sapi lokal yang masih produktif dan memperluas jangkauan program kawin silang sapi betina lokal dengan inseminasi buatan (IB).

Mafia Impor Daging Sapi di Indonesia ?

Sebelum menilik lebih dalam tentang awal mula terjadinya kasus mafia impor daging sapi di Indonesia, perlu kita ketahui bahwa adanya kesempatan dari lembaga atau beberapa pihak terkait yang sengaja memanfaatkan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan kebijakan perdagangan internasional, khususnya kerja sama dalam hal impor daging sapi dengan dalih belum tercukupinya swasembada kebutuhan komoditas tersebut. Kerjasama itu, melibatkan antar 2 negara yakni Indonesia dan Australia yang sudah sejak lama melakukan hubungan bilateral yang cukup baik.

Kerjasama ekspor impor daging sapi ini penting karena penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan daging sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan. Sehingga salah satu jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia.

Indonesia menjadikan Australia sebagai sumber impor ternak sapi dan daging sapi yang jumlahnya cukup besar. Besarnya impor ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan kesejahteraan dan penambahan penduduk. Selain itu, juga dipengaruhi oleh meningkatnya kepedulian penduduk akan pentingnya kebutuhan protein hewani.

Saat ini sistem impor sapi Indonesia menggunakan sistem *country based*, yang artinya impor hanya bisa dilakukan dari suatu negara. Daging sapi impor harus didatangkan dari negara yang terbebas seluruhnya dari penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan sistem tersebut, negara yang dipilih salah satunya adalah Australia. Alih-alih sejahtera, bahkan beberapa

peristiwa yang dialami bangsa ini justru meneguhkan adagium jauh panggang dari pada api. Cita-cita menjadi Negara swasembada pangan sepertinya hanya impian. Pada Awal tahun 2013 ini, masyarakat Indonesia dihadapkan beberapa permasalahan terkait pangan. Yang cukup menyita perhatian adalah kasus suap impor daging sapi yang disinyalir melibatkan salah satumantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap impor sapi. Dalam kasus itu, selain Luthfi KPK menetapkan juga tersangka lain yakni Ahmad Fathanah, serta direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya. Pemberian uang itu diduga berkaitan dengan kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna (www.beritasatu.com,2013).

Wibowo (2013), menjelaskan bahwa beberapa modus mengeruk keuntungan dari kebijakan proimpor tak hanya melibatkan politisi, namun aparat pemerintah di lapangan serta pengusaha. Beberapa modusnya kejahatan yang disebabkan oleh jatuhnya mental para pengusaha, khususnya dibawah kebijakan lembaga terkait yakni: Kementerian Pertanian dan Perdagangan RI ini biasanya dilakukan antara lain :

1. *Mark up data*,

Estimasi kebutuhan komoditi pangan dilebih-lebihkan. Yang penting terdapat gap besar antara *supply* dan *demand* sehingga kesannya impor menjadi keharusan.

2. Permainan harga,

Membuat lonjakan harga komoditas pangan pada bulan-bulan tertentu. Sehingga, impor pangan terjustifikasi.

3. Ilusi pajak impor,

Mendorong kemudahan perpajakan sehingga importir mendapat keuntungan besar dari pembebasan PPN, bea masuk dan PPh. Keuntungan besar ini yang kemudian dibagi-bagi kepada siapa saja yang membantu menjaga impor, baik politisi, birokrat atau siapa saja.

4. Penyalahgunaan aturan,

Memainkan berbagai mekanisme pengaturan seperti kuota impor. Padahal faktanya, impor setiap komoditas pangan itu hanya dikuasai oleh segelintir pemain. Mekanisme kuota ini memudahkan membagi-bagi uang haram dari impor.

Terkait beberapa modus diatas, para mafia impor lebih dominan untuk memainkan ilusi dari pajak impor dari hulu hingga hilir, serta melibatkan beberapa pihak. Adapun beberapa sumber keuangan Negara yang hilang akibat dari mafia impor daging sapi dirincikan sebagai berikut :

1. Pembebasan PPN,

Dengan berbagai alasan, mafia impor berhasil memperjuangkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor daging. Akibatnya, selama periode Januari 2010-Juli 2011 negara kehilangan PPN sebesar Rp 546 milyar, hanya dari daging sapi (termasuk jeroan). Berdasarkan *data base* Ditjen Bea Cukai (2012), jumlah impor daging sapi tahun 2010 adalah sebanyak 90.541.414 kg daging dan 49.599.762 kg jeroan/daging sisa. Jadi totalnya 140.141.176 kg. Untuk periode Januari-Juni 2011 jumlah impornya 25.080.734 kg daging dan 16.398.425 kg jeroan/daging sisa. Totalnya adalah 41.479.159 kg. Jumlah PPN yang harus dibayar adalah Rp 548.803.681.353,00 atau Rp 548,8 milyar. Ini dibebankan kepada 49 importir. Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan kepada negara hanya Rp 2,8 milyar. Sisanya yang Rp 546 milyar dibebaskan, sehingga menjadi tambahan keuntungan importir. Pastinya, rakyat Indonesia sama sekali tidak diuntungkan dari pembebasan PPN ini. Negara

kehilangan penerimaan, sementara rakyat tetap dibebani harga daging yang melonjak-lonjak. Yang unik, jumlah pembebasan PPN di atas ternyata setara dengan *fee* haram yang harus dibayarkan importir kepada oknum-oknum yang "membantu" mereka. Informasi yg beredar di lapangan, *fee* tersebut besarnya Rp 5000 per kg daging dan Rp 2000 per kg jeroan/daging sisa.

Jika dikalikan data impor di atas, diperoleh angka sekitar Rp 452,5 milyar ditambah Rp 99 milyar, yaitu Rp 551,5 milyar. Dengan kata lain, bisa dikatakan *fee* atau sebenarnya sogokan untuk oknum-oknum parpol dan non-parpol tersebut dibiayai dari pembebasan PPN. Para penegak hukum sebaiknya mulai menyelidiki dan menyalahkan pembebasan PPN ini.

2. Pemindahan klasifikasi antara daging sapi dengan jeroan/daging sisa,

Importir harus membayar bea masuk sebesar 5 persen terhadap nilai pabean dari barang yang diimpor. Nilai pabean dihitung berdasarkan harga CIF (*Cost, Insurance and Freight*), atau nilai patokan tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai. Karena harga CIF jeroan/daging sisa lebih rendah dari daging, importir yang nakal akan mengurangi kewajiban bea masuknya dengan melaporkan seolah-olah dia mengimpor jeroan/daging sisa. Padahal yang diimpor adalah daging.

Modus ini terbukti dalam kasus 4 perusahaan importir, yaitu IGU, IP, SLP dan BMA. Ini setelah laporan impor yg tercatat pada Ditjen BC (DJBC) dibandingkan dengan yang tercatat pada Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian. Selama periode Januari 2010-Juni 2011 diketahui jumlah impor daging keempat perusahaan tersebut adalah 13.453.271,13 kg (data DJBC), sementara data Barantan adalah 28.331.263,72 kg. Artinya, data impor daging di DJBC ternyata 14,9 ribu ton lebih rendah dari data Barantan.

Sementara untuk impor jeroan/daging sisa, data DJBC sebesar 30.993.006,85 kg, sementara data Barantan 7.841.980,59 kg. Artinya, data DJBC 23,2 ribu ton lebih besar dari Barantan. Karena harga CIF daging sapi lebih mahal dari jeroan/daging sisa, jelas negara kehilangan penerimaan bea masuk. Dokumen yang saya peroleh menyebutkan negara kehilangan potensi penerimaan bea masuk, PPN dan PPh sebesar Rp 48,5 milyar. Angka tersebut baru untuk 4 importir.

Sebagai catatan, kode *Harmonized System* (HS Code) untuk daging sapi adalah HS 0201 dan 0202. Sementara untuk jeroan/daging sisa masuk HS 0206. Penegak hukum juga perlu menyelidiki dan menyalahkan manipulasi data impor ini.

3. Permainan harga di pasar,

Menilai adanya permainan akan harga daging sapi dipasar tidak mudah dijangkau, karena estimasinya jauh lebih sulit dilakukan.

Terjadinya kasus dugaan suap impor sapi menjadi semacam pembuka mata, bahwa kebijakan pro-impor pangan adalah lahan subur untuk terjadinya praktik kecurangan. Bahkan Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Prof. Bustanul Arifin (2013), mengatakan pelaku kasus impor sapi bisa dikategorikan sebagai mafia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya daging sapi meningkat juga. Permintaan daging sapi yang meningkat tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri, maka daging sapi nasional.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir (2010-2014), jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan dengan rerata 2,404 ratus juta atau dengan kata lain tumbuh sebesar 1,38 persen. Disamping itu, mayoritas jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 207.176.162 jiwa (87,18 persen) diantaranya adalah penganut Agama Islam dan terbesar di Dunia. Yang dimana paling banyak mengkonsumsi daging sapi, terlebih lagi pada saat perayaan kegamaan, seperti: Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

2. Jumlah ketersediaan daging sapi di Indonesia dari produk lokal sebenarnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2009-2013) dengan rerata 382,55 ribu ton. Angka tersebut berbanding terbalik dengan pasokan daging sapi dari produk impor yang terus menurun hingga mencapai rerata 121,32 ribu ton. Dengan kata lain, *share* penyediaan keseluruhan selama kurun waktu 5 tahun ini berkisar rerata 73,98 persen (produk lokal) dan sisanya 26,02 persen (produk impor). Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mampu memenuhi stok daging sapi potong dalam negeri, sehingga masih bergantungnya akan produk impor. Permintaan (*demand*) masyarakat yang terus meningkat, sehingga ketersediaan (*supply*) daging sapi secara nasional masih kurang. Searah dengan kebijakan impor daging sapi dari luar negeri, khususnya kerja sama dengan Negara tetangga (Australia).
3. Masalah persapian Indonesia sebenarnya tetap terkungkung pada permasalahan klasik yang sebenarnya selalu menjadi 'pekerjaan rumah' seluruh *stake holder* persapian Indonesia dan hal ini harus diselesaikan untuk dapat memandirikan persapian nasional. Adapun beberapa permasalahan klasik tersebut antara lain : (1) Jatuhnya mental para pengusaha/birokrat, khususnya dalam hal ini dibawah naungan Lembaga Pemerintah yakni: Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI (2) Tata niaga, (3) Ego sektoral, (4) Penegakan aturan, (5) Program Pemerintah yang kurang terencana, (6) Penyediaan pakan ternak dan (7) Pendampingan dan bimbingan.

Saran

Berpijak kepada simpulan yang sudah dibuat, dapat diberikan saran terhadap Pemerintah serta *stake holders* lainnya dalam kebijakan pembangunan swasembada pangan nasional, khususnya dibidang penyediaan daging sapi menuju kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah :
 - a. Hendaknya memperbaiki (revolusi) mental para Pengusahanya, khususnya dalam hal ini dibawah Lembaga naungan terkait, yakni: Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.
 - b. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan-Kementerian Pertanian RI sudah melakukan pemetaan ternak, seperti: sensus ternak sapi dan kerbau bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.
 - c. Pemetaan kebutuhan daging sapi.
 - d. Perbaikan tata niaga.
 - e. Bijak dalam impor ternak dan daging/jeroan sapi.
 - f. Memberikan rangsangan dan stimulus dengan merevitalisasi dan sosialisasi antar kelembagaan terkait, baik teknis maupun non-teknis di masing-masing wilayah Indonesia. Kemudian prioritas khusus berupa fasilitas transportasi ternak di pelabuhan, kereta api, kapal laut dan bebas antri di pelabuhan antar pulau, serta pengurangan biaya retribusi, pemeriksaan hewan di karantina dan pembebasan pajak hasil ternak.

- g. Pola pertanian terpadu.
2. Bagi Masyarakat dan *Stake Holders* :
 - a. Mampu meningkatkan atau menumbuhkembangkan jiwa *enterpreneurship* khususnya didunia peternakan sapi, kambing, maupun kerbau. Sehingga secara tidak langsung memberi sumbangsih ketahanan (swasembada) pangan nasional.
 - b. Melakukan pengawasan secara internal dan eksternal, baik dilapangan maun non-lapangan.
 - c. Berfikir secara terbuka, kritis, aktual/valid dan mampu memberikan sebuah win-win solutions terhadap masalah terkait.
 - d. Saling bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah lainnya, seperti: Kepolisian, BPKP maupun PPATK, Ditjen/Kantor Pajak Pusat ataupun tiap Daerah asal ketika ada penyalahgunaan dalam kebijakan, dan sebagainya.

REFERENSI

- Daryanto, Arif. 2009. *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*. Penerbit IPB: Pres. Bogor.
- Indriantoro dan Soetomo. (2002). *Peranan Data Sekunder Dalam Penelitian*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Mikro Ekonomi*. Edisi Kelima. Penerbit: PT Erlangga. Jakarta.
- Maleong, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rusda Karya. Bandung.
- Nazir. (2003). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Kelima. Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prasetyo. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit: PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Santoso, K., Warsito, S. dan Andoko, A. (2012). *Bisnis Penggemukan Sapi*. Penerbit: PT Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar*. Edisi Ketiga Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuyun, A. (2011). *Variasi Steak*. Penerbit: PT Agromedia. Jakarta.
- Astawan, P. D. (2004). *Pentingnya Mengonsumsi Daging*. <http://peternakantaurus.wordpress.com/2010/07/26/pentingnya> mengonsumsi daging. Diakses pada Pukul 10.26 WITA. Tanggal 11 Juli 2015. Kota Samarinda.
- Prima, I. B. (2008). Kebijakan Impor Daging Sapi dan Ketahanan Pangan. *detikNews*. Retrieved December 10, 2012, from <http://news.detik.com/read/2008/>. Diakses pada Pukul 08.43 WITA. Tanggal 11 Juli 2015. Kota Samarinda.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian_kualitatif.pdf. Diakses pada Pukul 13.15 WITA. Tanggal 16 Juli 2015. Kota Samarinda.
- Trantono, Y. (2008). *Bangsa - Bangsa Sapi Potong*. https://yuari.wordpress.com/about/6213_1090223899261_1336400769_3023567_3_4233792_n/. Diakses pada Pukul 08.43 WITA. Tanggal 11 Juli 2015. Kota Samarinda.
- <http://blogber.blogdetik.com/2015/02/04/ternyata-harga-daging-sapi-di-indonesia-termahal-di-dunia/#more-80>. Diakses pada Pukul 12.03 WITA. Tanggal 11 Juli 2015. Kota Samarinda.
- <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=a71d949fc4626b571f3e647277228d86&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>. Diakses pada Pukul 16.11 WITA. Tanggal 14 Juli 2015. Kota Samarinda.

- <http://ziazannitah-pawana.blogspot.com/2013/09/cita-cita-ber-swasembada-daging-sapi.html>. Diakses pada Pukul 14.54 WITA. Tanggal 22 Juli 2015. Kota Samarinda.
- Arifin, Bustanul. (2013). www.BeritaSatu.Com, [Kebijakan Impor Pangan Ciptakan Modus Mafia Keruk Keuntungan](#). Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Diakses pada Pukul 22.37 WITA. Tanggal 17 Juli 2015. Kota Samarinda.
- Dwiyanto, K. (2008). *Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Inovasi Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Sapi Potong di Indonesia*. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian I(3). Volume 2008. Hal:173-188.
- Pambagyo, Agus. *Politik Ketahanan Pangan vs Sapi Australia*. Jurnal Medan, 17 Juni 2011.
- Sutaryono, M. (2013). *Kritisnya Kondisi Pangan dan Agraria*. Peneliti BPTP Provinsi Sumatera Selatan. Dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia. 23 Januari 2013.
- Wibowo, Dradjad H. (2013). *Kasus Mafia Impor Daging Sapi*. 12 Februari 2013. Sustainable Development-Indonesia (SDI). Jakarta.
- BPS Nasional. (2011). *Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia Menurut Agama yang Dianut Tahun 2010 (Jiwa)*. Hasil Perhitungan Sensus Penduduk Tahun 2010 Publikasi Tahunan. Jakarta.
- _____. (2015). *Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2010 -2014*. Publikasi Tahunan. Jakarta.
- Direktorat Jendral Peternakan. (2010). *Pedoman Teknis Kegiatan Operasional PSDS 2014*. Direktorat Jenderal Peternakan. Kementan RI. Jakarta.
- _____. (2012). *Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014*. Direktorat Jenderal Peternakan. Kementan RI. Jakarta.
- _____. (2015). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014*. Jakarta. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Jakarta.
- Ditjen Bea Cukai. (2012). *Modus Mafia Impor Daging Sapi dan Kerugian Keuangan Negara*. DJBC RI. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. (2004). *Dokumen Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan Tahun 2005-2010*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang “Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practice)”. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 1 dan 2 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Jakarta.
- World Bank. (2013). *Daftar Harga Daging Sapi/Kg Bulan Desember 2012 di Beberapa Negara*. Overview and Program Description. Social Development Program. Whashington DC. USA.